Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



SELASA PON

manusiaan dan

16 JUNI 2020 (24 SAWAL 1953 / TAHUN LXXV NO 250)

HARGA RP 3.000 / 16 HALAMAN

SULTAN MENYAPA WARGA DIY

Ajak ASN Hidupkan Birokrasi Melayani

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak tatanan dalam kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan beberapa dampak negatif, pandemi Covid-19 di sisi lain juga memberikan efek cukup positif, khususnya terjadinya pergeseran peradaban yang mengubah perilaku menjadi lebih baik. Budaya bersih, peduli lingkungan, belajar disiplin, menguji rasa ke-



Konsekuensi dari itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersiap diri memasuki era normal baru dengan norma dan etika yang baru pula. Seperti yang disampaikan Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang kali ini kembali menyapa warga DIY. Lewat program ini Sultan ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Reformasi birokrasi telah digulirkan di DIY sejak Maklumat No 10/1946 tentang Perubahan Pangreh Pradja ke Pamong Pradja. Esensinya bukan sekadar istilah, tetapi juga mengubah tata pemerintahannya, dari 'Abdi Negara' ke 'Abdi Masyarakat'. Di situlah sumber filosofi ASN itu, dari 'dilayani' menjadi 'melayani'. Mereka bukan sekadar kerumunan pekerja kantoran, tapi insan peradaban

> sarat empati," tandas Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (15/6).

Sultan mengungkapkan, ASN harus mengubah mindset, karena masyarakat yang dilayani saat ini semakin cerdas dengan tuntutan yang beragam. Karena itu semua itu perlu dibiasakan sejak dini, diimbangi lompatan pemikiran nonlinier.

"Meski bermetafora mekanis, wahana baru itu tetap punya hakikat organisme biologis yang hidup, bukan mesin. Karena birokrasi baru merupakan jaringan pemikiran trans-disiplin, para pakar yang berbagi ilmu, perwujudan Triple Helix model Yogya. Mereka ada yang di dalam dan yang lain di luar birokrasi, sehingga menjadikannya

* Bersambung hal 7 kol 5

Sekolah Tetap Mulai Juli Selain Zona Hijau, Tatap Muka Dilarang



 BELAJAR DARING (jarak jauh) Zona kuning, oranye dan merah (94 %)

 BELAJAR DENGAN TATAP MUKA Zona hijau (6 %), ditetapkan Gugus Tugas Covid-19.

- Syarat: 1. Kab/Kota zona Hijau
- dengan izin. 2. Satuan pendidikan siap. 3. Komite/Orangtua Setuju.
- Tahap 1, bulan 1-2 mulai dari SMA, MA, SMK, MAK dan
- Tahap 2, bulan 3-4. SD, MI,
- Tahap 3, bulan ke-5, PAUD formal dan non formal dengar
- Protokol. PENDIDIKAN TINGGI

Mulai Agustus 2020 dengan daring Sumber: Diolah

tahun ajaran baru dimulai Juli 2020, namun demikian kegiatan tatap muka hanya dibolehkan bagi sekolah yang berada di zona hijau. Itupun dengan sejumlah persyaratan. Sedangkan sekolah yang berada di zona kuning, oranye dan merah, pembelajaran dilarang dilakukan dengan tatap muka di satuan pendidikan. Saat ini daerah yang berada di zona hijau (tidak terjangkit virus Ko-

JAKARTA (KR) - Meski

rona/Covid-19) hanya 6 persen (85 kabupaten/kota). Sedangkan 94 persen daerah lainnya (429 kabupaten/kota), masuk dalam zona kuning, oranye dan merah.

Demikian penegasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta, Senin (15/6).

"Prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran," ujar Nadiem menjelaskan tentang keputusan bersama antar

kementerian terkait. Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka yakni sekolah berada

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis KR Zero Pilkada 2020

Sri Sultan Hamengky Buwono X

Dr King Faisal Sulaiman

RAPAT gabungan KPU dengan Komisi II, Selasa 27 Mei 2020, akhirnya menyetujui Pilkada akan dihelat 9 Desember 2020. Artinya, tahapan sudah bisa dimulai pada pertengahan Juni 2020, sesuai arahan Perpu Pilkada. Ruang publik kembali dipenuhi perdebatan. Apakah tepat atau justru sesat, pilihan menggelar pilkada, dimana semua konsentrasi dan relokasi anggaran praktis, diarahkan untuk penanggulangan pandemi?

Kebutuhan menjalankan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan, sudah pasti menelan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana dengan setumpuk regulasi pelaksana yang telanjur disetting dalam kondisi normal, diharuskan untuk segera diubah dengan kondisi pandemi? Apakah tidak berisiko, kontak fisik petugas dengan pemilih ketika verifikasi faktual dan pemungutan suara? Apalagi Perpu No 2 (UU) Pilkada sendiri lupa, mengatur klausul calon perseorangan yang diharuskan menjalani verikasi faktual dukungan dengan menanyakan langsung lewat door to door? Belum lagi besaran rekrutmen petugas TPS dan angka partsipisai

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
SALAT		15.02	17.33	18.47	04.28
Selasa, 16 Juni 2020 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi D					vil Provinsi DIY

NETIZEN BERTANYA, PEMDA DIY MENJAWAB

Mahasiswa Baru Harus Karantina

YOGYA (KR) - Seandainya pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan di kampus-kampus di DIY. masyarakat tak perlu cemas. Lebih-lebih dengan datangnya lebih dari 100.000 mahasiswa baru ke DIY yang dikhawatirkan bakal memunculkan gelombang kedua Covid-19. Semua itu bisa dihindari jika masyarakat memastikan, mahasiswa baru

yang datang ke DIY itu, melakukan karantina secara baik selama dua minggu.

"Kita tidak perlu menolak dan mempersulit mereka, tetapi yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi agar mereka bisa melakukan karantina dengan baik. Itu adalah cara kita bisa mencegah penularan Sar-Cov 2 ini dari tempat atau lingkungan tempat tinggal kita," tegas Tim Perencanaan Data dan Analis Gugus Tugas Covid-19 DIY Dr Riris Andono Ahmad MPH Ph ketika merespons pertanyaan dari netizen dengan tema 'Kesiapan DIY Menghadapi Kondisi Kenormalan Baru" di Yogyakarta,



K Baskara Aji

Senin (15/6). Lewat 'program netizen

bertanya Pemda DIY meniawab' tersebut diharapkan bisa mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Soal ratusan calon mahasiswa baru yang akan masuk ke DIY. Riris menegaskan, kuncinya adalah mereka harus melakukan karantina selama dua minggu ketika sampai di DIY. Mempunyai surat be-

bas Covid-19 dari wilayah asal mereka, itu baik, tetapi tidak menjamin mereka tak tertular. Daripada melakukan pengetesan di daerah asal sebaiknya mereka melakukan karantina 14 hari penuh di tempat kos, sehingga memastikan mereka tidak menularkan virus bagi warga DIY.

"Salah satu cara untuk mencegah penularan lebih lanjut adalah menggunakan masker medis maupun masker kain, karena di DIY sudah ada penularan lokal Covid-19," ujar Direktur Pusat Kesehatan Tropis UGM ini.

* Bersambung hal 7 kol 1

KASUS SUSUR SUNGAI DIADILI Alat Keselamatan Tak Ada

SLEMAN (KR) - Para terdakwa kasus susur sungai Sempor Donokerto Turi yang menelan korban 10 siswa SMPN 1 Turi, yakni RY, IYA dan DDS mulai diadili di PN Sleman Senin (15/6) Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), para terdakwa diduga tidak melakukan survei lapangan, tak mempersiapkan alat keselamatan siswa dan alat komunikasi. Untuk itu para terdakwa didakwa dengan Pasal 359 KUHP dan 360 (2) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

JPU Yogi Rahardjo SH mengungkapkan, kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Turi di antaranya susur sungai bagi kelas VII dan VIII. Bahkan kegiatan itu telah diprogramkan tahun ajaran 2019/2020.

"Kegiatan susur sungai itu dilaksanakan pada 21 Februari 2020 pukul 13.30 di Sungai Sempor yang dipimpin IYA, RY dan DDS selaku pembina pramuka. Susur sungai itu diikuti sekitar 249 siswa," ungkap JPU di depan majelis hakim yang diketuai Annas Mustaqim SH MHum.

Dalam sidang kemarin dilakukan secara virtual. Untuk majelis hakim bersama JPU dan penasihat hukum para terdakwa berada di PN Sleman. Sedangkan untuk ketiga terdakwa berada di Lapas Cebongan.

Lebih lanjut dikatakan JPU, kegiatan susur sungai merupakan kegiatan yang mengandung bahaya dan penuh risiko bagi keselamatan jiwa peserta. Para pembina pramuka seharusnya berpedoman

* Bersambung hal 7 kol 1

DOMPET 'KR' #Bersama Kita Melawan Virus Korona

الصَّدَقَةُ تَرُدُّ البَلاء وَتُطَوِّلُ

Ash-shodagotu taruddu al-balaía wa tuthowwilu al-'umro. "Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur" (Al-Hadis)

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ini para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BRI 0409.01.000135.304 atas nama Kedaulatan Rakyat. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972. Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

2011101 00111011011 9 0000011 1110119						
NO	NAMA	ALAMAT		RUPIAH		
Melalui Transfer						
	Fenty Puspitas					
452	2 Sri Widiyanti .			200,000.00		
453	3 NN			100,000.00		
454	NN			250,000.00		
455	Muhammad Hi	ilmy		150,000.00		
	JUMLAH		Rp	750,000.00		
	s/d 12 Juni 202	20	Rp	277,187,026.00		
	s/d 15 Juni 20	20	Rp	277,937,026.00		
(Dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga pu-						
luh tujuh ribu dua puluh enam rupiah)						

PENANGANAN COVID-19 DI JATENG

Zona Merah Tinggal 3 Daerah

SEMARANG (KR) - Penanganan serius Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terhadap wabah Covid-19 mulai menunjukkan hasil. Hingga saat ini, masih tersisa tiga daerah yang masuk kategori zona merah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Magelang.

Hal itu dikemukakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai memimpin Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, di Semarang, Senin (15/6). Rapat dihadiri jajaran instansi terkait, rumah sakit serta tim ahli.

"Dari laporan dan analisis semuanya, hari ini tinggal Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Magelang yang masih zona merah. Sementara lainnya sudah masuk zona kuning,



Ganjar Pranowo

bahkan Banyumas dan Wonosobo sudah cenderung masuk ke zona hijau," ungkap Ganjar Pranowo. Terhadap tiga daerah yang masih zona merah itu,

Ganjar akan segera mengirimkan surat khusus. Surat diberikan agar kepala daerah di tiga daerah tersebut semakin memperketat kegiatan masyarakatnya. "Di tiga daerah itu saya

minta kepala daerahnya berhati-hati betul. Saya minta agar kegiatan masyarakatnya diketatkan lagi. Kalau ada aktivitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya kerumunan, harus dilarang. Nanti saya akan kirim surat agar pembatasannya lebih ketat," tegas Ganjar.

Ganjar menerangkan, surat itu penting karena dirinya melihat masyarakat masih banyak yang tidak mempedulikan protokol kesehatan.

* Bersambung hal 7 kol 5



● SAYA punya teman memiliki kebiasaan unik sejak menikah, kalau makan selalu sepiring berdua dengan suami. Ketika sudah punya anak, dia makan berdua dengan suami atau anaknya. Kalau suami atau anaknya akan pergi, lebih dulu diajak makan bersama. Kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang, ketika dia sudah punya tiga anak. Saat ini, si sulung sudah lulus kuliah dan dua adiknya masih kuliah. (Prayudi, Bekelan RT 1 Tirtonirmolo, Kasihan Bantul 55181)-d